



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14 /DPR RI//2023-2024

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA PRIORITAS TAHUN 2023
DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020-2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR RI//2022-2023;
 - c. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 10/DPR RI//2023-2024;
 - d. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2023

telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 untuk ditetapkan;

- e. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 7 tanggal 3 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

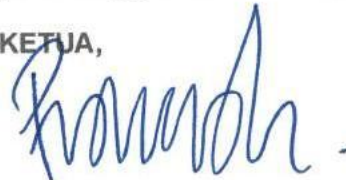
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA PRIORITAS TAHUN 2023 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2020-2024.**
- PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDJ Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FDEMOKRAT, FPKS, FPAN, dan FPPP;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : /DPR RII/2023-2024
TANGGAL : 3 Oktober 2023

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR (KOMISI I)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	DPR (KOMISI III)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR (KOMISI IV)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi IV • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU dalam tahap Harmonisasi di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR (KOMISI VI)	Proses penyusunan
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan).	DPR (KOMISI VII)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VII • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR (KOMISI IX)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Harmonisasi • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan di Badan Legislasi • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah disampaikan ke DPR RI • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses penyusunan
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	DPR (BADAN LEGISLASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses penyusunan
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman.	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia).	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Prolegnas Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2023
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VIII • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR (ANGGOTA)	Proses penyusunan
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi I • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • SurPres sudah diterima DPR • Proses Pendalaman di internal Pemerintah • Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.	PEMERINTAH	Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	Proses penyusunan
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Usulan baru Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.	PEMERINTAH	Proses penyusunan
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	PEMERINTAH	Proses penyusunan
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.	PEMERINTAH	Proses penyusunan
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.	PEMERINTAH	Proses penyusunan
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU memasuki proses pembicaraan Tk. I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Pansus • Luncuran Prolegnas Prioritas 2022
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU memasuki proses pembicaraan Tk. I di Komisi X

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /DPR RI//2023-2024
TANGGAL : 3 Oktober 2023

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEENAM
TAHUN 2020-2024**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer.	DPR	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi.	DPR	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/DPD	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri.	DPR	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.	DPR	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim.	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum.	DPR	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	DPR	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan.	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan.	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	DPR	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan.	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	DPR	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.	DPR	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	DPR	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan.	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring.	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi.	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	DPR	
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	DPR	
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	DPR	RUU <i>Carry Over</i>
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya.	DPR	
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik.	DPR	
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial.	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial.	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR	
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	DPR	
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	DPR/ PEMERINTAH	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional.	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.	DPR	
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara.	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol.	DPR	
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual.	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak.	DPR	
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial.	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama.	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.	DPR	
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.	DPR	Diusulkan untuk disesuaikan judulnya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Apoteker (usul Anggota).
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti).	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan.	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat.	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan.	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan.	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan.	DPR	
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam.	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR	
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional.	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan.	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional.	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>).	DPR	
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan.	DPR	
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.	DPR	
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah.	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultansi Pajak.	DPR	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.	DPR	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	DPR	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	DPR	
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus.	DPR	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusilaan.	DPR	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Medis.	DPR	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan)	DPR	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Integrasi Data Pembangunan	DPR	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman	DPR	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis.	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan	DPR	Usulan baru Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	DPR/ PEMERINTAH /DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD	
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	DPR/DPD	
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/ PEMERINTAH	
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/ PEMERINTAH	
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	DPR/ PEMERINTAH	
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	DPR	
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara. (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/ PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.	DPR	
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	DPR/ PEMERINTAH	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	DPR/ PEMERINTAH	
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	DPR/ PEMERINTAH	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.	DPR	
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.	DPR	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.	DPR	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.	DPR	
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR/ PEMERINTAH	
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/ PEMERINTAH	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	DPR/ PEMERINTAH	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	DPR/ PEMERINTAH	
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.	DPR/ PEMERINTAH	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.	DPR	
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	DPR/ PEMERINTAH	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/ PEMERINTAH	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Emas.	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	DPR/DPD	
178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/DPD	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	DPR/DPD	
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi.	DPR/DPD	
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR/DPD	
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/DPD	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/DPD	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.	DPR/DPD	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.	DPR/DPD	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien.	DPR/DPD	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	DPR/DPD	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	DPR/DPD	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPR/DPD	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.	PEMERINTAH	
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian.	PEMERINTAH	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional.	PEMERINTAH	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	PEMERINTAH	
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan.	PEMERINTAH	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	DPR	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	PEMERINTAH	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.	PEMERINTAH	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha.	PEMERINTAH	
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.	PEMERINTAH	
207.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.	PEMERINTAH	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.	PEMERINTAH	
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal.	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara.	PEMERINTAH	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	PEMERINTAH	
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>).	PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender.	PEMERINTAH	
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	PEMERINTAH	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>).	PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH	
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.	PEMERINTAH	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan.	PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
224.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.	PEMERINTAH	
225.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
227.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH	
228.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	PEMERINTAH/ DPD	
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah.	DPD	
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah.	DPD	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketrasmigrasian.	DPD	
237.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa.	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	DPR/DPD	
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang.	DPD	
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	DPD	
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	DPD	
247.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah.	DPD	
248.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah.	DPD	
249.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah.	DPD	
250.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	DPD	
251.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.	DPD	
252.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.	DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
253.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DPD	
254.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara.	DPD	
255.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital.	DPD	
256.	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPD	

NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI